



TRANSPARANSI PEMERINTAH DAN KINERJA DAERAH DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN POLITIK MASYARAKAT

Asep Somanteri ¹

¹ Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

e-mail: dosenasepsomantri@gmail.com

*Corresponding author: dosenasepsomantri@gmail.com

ABSTRAK

Informasi

Artikel:

Terima:

Revisi:

Disetujui:

Kepercayaan politik merupakan indikator utama kualitas sistem demokrasi yang mencerminkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap kemampuan institusi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh kinerja pemerintah daerah dan transparansi pemerintahan terhadap kepercayaan politik masyarakat di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Data diperoleh melalui kuesioner daring dengan skala Likert dari 300 responden yang merupakan masyarakat berdomisili di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan politik masyarakat (t -statistik 9,928; p -value 0,000). Demikian pula, transparansi pemerintahan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan yang kuat terhadap kepercayaan politik (t -statistik 11,547; p -value 0,000), bahkan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan variabel kinerja. Model penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat tinggi dengan nilai R -Square sebesar 94,2%, sementara uji *Goodness of Fit* menghasilkan nilai SRMR 0,042 yang menunjukkan tingkat kesesuaian model yang sangat baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara efektivitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memperkuat legitimasi politik di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kepercayaan Politik, Kinerja Pemerintah Daerah, Transparansi Pemerintahan, Good Governance

ABSTRACT

Political trust is a vital indicator of the quality of a democratic system, reflecting the extent to which the public believes that government institutions can function effectively, responsively, and accountably. This study aims to empirically analyze the influence of local government performance and government transparency on public political trust in Sindangbarang District, Cianjur Regency. The research employs a quantitative approach using *Structural Equation Modeling* (SEM) based on *Partial Least Square* (PLS) with SmartPLS 4.0 software. Data were collected through online questionnaires using a Likert scale from 300 respondents who are residents of Sindangbarang District. The results of the study indicate that local government performance has a positive and significant influence on public political trust (t -statistic 9.928; p -value 0.000), with a path coefficient of 0.456. Furthermore, government transparency also demonstrates a significant

positive influence on political trust, showing a stronger impact than the performance variable (t-statistic 11.547; p-value 0.000; path coefficient 0.525). The research model exhibits very high predictive power with an R-Square value of 94.2%, meaning these two variables explain the vast majority of variations in public political trust in the region. Additionally, the Goodness of Fit test resulted in an SRMR value of 0.042, indicating an excellent model fit. The study concludes that the synergy between effective public service performance and information openness is a fundamental pillar for achieving good governance and strengthening political legitimacy at the local level

Keywords: Political Trust, Local Government Performance, Government Transparency, Good Governance

PENDAHULUAN (Book Antiqua 12, bold, spasi 1.15)

Kepercayaan politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem politik dan pemerintahan demokratis. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mencerminkan sejauh mana institusi politik dianggap mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, responsif, dan akuntabel (D. S. K. Dewi et al., 2024; Widaningrum, 2017). Dalam konteks sistem politik lokal di Indonesia, kepercayaan politik masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik serta keberlanjutan proses demokrasi di tingkat daerah (Gani & Suparman, 2023). Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah daerah, maka partisipasi politik, dukungan terhadap kebijakan publik, serta legitimasi pemerintahan cenderung meningkat.

Salah satu faktor yang diyakini berpengaruh terhadap kepercayaan politik masyarakat adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Afifuddin et al., 2022; Syrstad et al., 2025). Pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja yang baik melalui pelayanan publik yang efektif, program pembangunan yang tepat sasaran, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat (Nasirin et al., 2023; Pareek & Sole, 2022). Sebaliknya, kinerja pemerintah yang dianggap tidak optimal dapat menurunkan legitimasi politik dan memunculkan sikap skeptis masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Dawkins, 2020).

Selain kinerja pemerintah daerah, transparansi pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan politik masyarakat. Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan sumber daya public (Rahman et al., 2024). Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi publik secara lebih terbuka sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (Fardiah, 2025). Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi juga berperan penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Tuati et al., 2021) (Hamzah et al., 2024). Keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran publik dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, rendahnya tingkat transparansi seringkali menimbulkan

persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan politik (Kim et al., 2020; Tuati et al., 2021).

Kecamatan Sindangbarang di Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial dan politik lokal yang menarik untuk dikaji. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, masyarakat di wilayah ini berinteraksi secara langsung dengan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan tingkat transparansi pemerintahan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan politik yang mereka miliki terhadap institusi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah dan transparansi pemerintahan terhadap tingkat kepercayaan politik masyarakat di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sosiologi politik dan pemerintahan daerah, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan politik masyarakat.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepercayaan Politik

Kepercayaan politik merupakan konsep penting dalam studi sistem politik dan demokrasi. Kepercayaan politik merujuk pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap institusi politik dan aktor pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif, adil, serta sesuai dengan kepentingan publik (Ecevit & Karakoç, 2016; Uslaner, 2015). Kepercayaan ini mencerminkan sejauh mana masyarakat meyakini bahwa pemerintah mampu mengelola sumber daya publik dan membuat kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Sumitro & Yorman, 2024). Dalam perspektif sosiologi politik, kepercayaan politik berkaitan erat dengan legitimasi pemerintahan. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, maka legitimasi politik akan semakin kuat dan stabilitas sistem politik dapat terjaga (Ramadhanti, 2022). Sebaliknya, rendahnya kepercayaan politik dapat memunculkan sikap apatis, ketidakpuasan terhadap pemerintah, bahkan potensi konflik antara masyarakat dan negara (Pratiwi, 2020; Ramadhanti, 2022). Oleh karena itu, kepercayaan politik masyarakat sering dijadikan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di suatu wilayah. Kepercayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kinerja pemerintah, transparansi kebijakan, akuntabilitas publik, kualitas pelayanan publik, serta persepsi masyarakat terhadap integritas pejabat pemerintah (Sumitro & Yorman, 2024; Teguh & Mohammad, 2025).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat (Desa et al., 2023; Fahira, 2023). Kinerja pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Setiadi et al., 2025). Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Y. S. Dewi, 2025; Wahyono & Muhammad, 2025). Pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, responsif terhadap kebutuhan

masyarakat, serta mampu menjalankan program pembangunan secara optimal cenderung memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Penilaian positif tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Finanda et al., 2024).

Sebaliknya, apabila masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu determinan penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan politik masyarakat (Putri et al., 2023; Sihombing & Arsani, 2020).

Transparansi Pemerintah

Transparansi pemerintahan merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Ardielli & Vavrek, 2019). Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya publik (Alvioni et al., 2022; Widyaningrum & Utama, 2022). Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara akuntabel. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Arkarizki et al., 2023; Henovanto et al., 2019).

Transparansi yang tinggi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Schmidhuber et al., 2020; Wu et al., 2017). Sebaliknya, rendahnya tingkat transparansi dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Grimmelikhuijsen et al., 2013).

Pengembangan Hipotesis

Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat

Kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Amir et al., 2024; Maschuroh & Priono, 2021). Dalam konteks sistem politik lokal, kinerja pemerintah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif, menjalankan program pembangunan yang tepat sasaran, serta merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat (Hariyanto, 2022). Kinerja pemerintah yang baik mencerminkan kapasitas institusi pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara optimal sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Clarke et al., 2023; Ivanyna & Salerno, 2021).

Dalam perspektif sosiologi politik, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan tingkat legitimasi politik. Ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah cenderung meningkat (Afdila & Adnan, 2023; Sirajuddin & Atrianingsi, 2020). Sebaliknya, kinerja pemerintah yang dianggap tidak memadai dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berpotensi menurunkan kepercayaan politik. Dengan kata lain, pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan publik dan

merasakan dampak kebijakan pemerintah menjadi dasar penting dalam membentuk sikap kepercayaan terhadap pemerintah (Abdillah & Fadilah, 2024; Trisakti et al., 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan keberhasilan program pembangunan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Chaharani et al., 2020; Rauf, 2021; Subardi, 2018). Oleh karena itu, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan politik masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat

Transparansi Pemerintahan terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat

Transparansi pemerintahan merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Kristiyanto, 2016). Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya public (Agustina, 2023; Trisakti et al., 2022). Dalam sistem politik demokratis, transparansi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara akuntabel dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Annisa, 2024; Kristian et al., 2020).

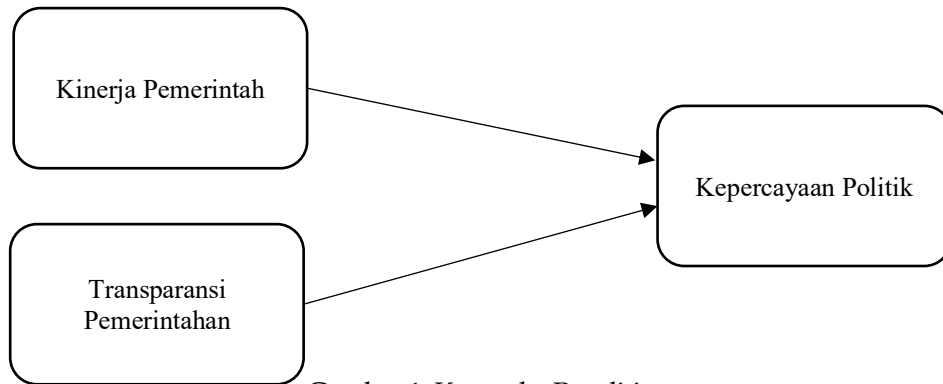
Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah (Kristiyanto, 2016). Hal ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta memperkuat partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Hidayat, 2025; Jalaludin & Gefira Minhatul Maula, 2025). Ketika pemerintah bersikap terbuka dan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat, maka masyarakat cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah (Hidayat, 2025). Dalam perspektif kepercayaan politik, transparansi berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian dan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah (Hu et al., 2020; Riyadh et al., 2023). Keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran publik dapat memperkuat legitimasi politik serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Hu et al., 2020). Sebaliknya, rendahnya transparansi seringkali menimbulkan persepsi negatif yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan politik masyarakat (Crepaz & Arian, 2023).

Berdasarkan argumentasi tersebut, transparansi pemerintahan dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan politik masyarakat.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Transparansi Pemerintahan terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat

Dari pengembangan hipotesis di atas, maka digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN (Book Antiqua 12pt, bold, spasi 1.15)

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji sejauh mana kinerja pemerintah dan transparansi pemerintahan berpengaruh terhadap kepercayaan politik lokal di Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur. Analisis data dilakukan dengan metode **Structural Equation Modeling (SEM)** berbasis **Partial Least Square (PLS)** menggunakan bantuan perangkat lunak **SmartPLS versi 4.0** guna memperoleh hasil yang akurat dan komprehensif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Populasi penelitian mencakup warga yang telah memenuhi kriteria sebagai responden, yaitu masyarakat yang berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability purposive sampling. Responden yang dipilih merupakan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sindangbarang dan memenuhi kriteria penelitian, yaitu berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan kondisi dan persepsi masyarakat secara umum terkait kinerja pemerintah daerah, transparansi pemerintahan, serta tingkat kepercayaan politik masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 300 responden yang memenuhi syarat dan dijadikan sebagai responden penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melibatkan tiga variabel, yang terdiri dari dua variabel independen yaitu kinerja pemerintah dan transparansi pemerintahan, serta satu variabel dependen yakni kepercayaan politik lokal. Data penelitian diperoleh secara kuantitatif melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form, dengan menggunakan skala

Likert, di mana responden memberikan penilaian mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Metode ini digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat kesetujuan responden terhadap setiap pernyataan penelitian secara terukur dan sistematis.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi SmartPLS 4.0., metode ini dipilih karena mampu menguji secara komprehensif hubungan antara variabel digital marketing, inovasi produk, dan keberlanjutan bisnis UMKM. Proses analisis dalam SEM-PLS mencakup dua model utama, yakni outer model dan inner model. Outer model berfungsi untuk menilai tingkat validitas serta reliabilitas setiap indikator terhadap konstruk laten yang diukur (Mohd Dzin & Lay, 2021). Uji validitas mencakup dua aspek utama, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity terpenuhi apabila nilai *loading factor* setiap indikator melebihi 0,7, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut secara konsisten merepresentasikan konstruknya. Sementara itu, discriminant validity dinyatakan baik apabila nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk laten berada di atas 0,5, menandakan bahwa variabel memiliki kemampuan membedakan diri dari konstruk lainnya. (Ciavolino et al., 2021). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Composite Reliability dan Cronbach's Alpha, di mana suatu variabel dianggap reliabel apabila memiliki nilai lebih dari 0,7. Selanjutnya, inner model digunakan untuk menilai hubungan antar variabel laten melalui analisis path coefficient, yang menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh antar variabel, serta R-Square (R^2) yang mencerminkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Selain itu, tingkat kesesuaian model dievaluasi menggunakan Goodness of Fit (Q^2) dan Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). Model PLS dikatakan memenuhi kriteria goodness of fit apabila nilai SRMR berada di bawah 0,10, dan dikategorikan perfect fit jika nilainya kurang dari 0,08 (Imtihansyah et al., 2024; Legate et al., 2023). Selain itu, proses pengujian hipotesis diterapkan dengan menggunakan metode bootstrapping, yang berfungsi untuk mengatasi kendala pada data penelitian yang tidak berdistribusi normal. Teknik ini memungkinkan estimasi parameter dilakukan melalui pengambilan sampel ulang (resampling) sehingga hasil pengujian menjadi lebih akurat dan tidak bergantung pada asumsi distribusi normal (Bader & Moshagen, 2025; Zhang & Wu, 2024). Suatu hipotesis dapat diterima apabila memenuhi kriteria pengujian, yaitu nilai t-statistik menunjukkan angka lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value berada di bawah 0,05. Dengan kondisi tersebut, hipotesis alternatif (H_a) dinyatakan diterima, sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak karena hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan sesuai dengan batas signifikansi yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dengan Measurement Model (Outer Model)

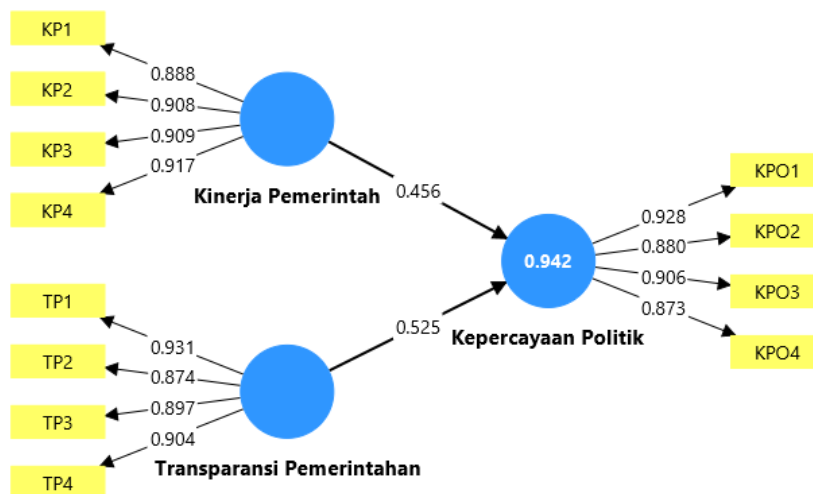
Dalam konteks analisis penelitian, model pengukuran atau *outer model* memiliki fungsi utama untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas (Maulana Rizky, Alhidayatullah, 2025; Setiadi, Sandi; Alhidayatullah; Maulana, 2025). Model ini juga berperan dalam menggambarkan hubungan antara indikator-indikator yang digunakan dengan variabel laten yang diwakilinya. Secara sederhana, *outer model* memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian benar-benar mampu merepresentasikan konsep yang diteliti melalui pengujian validitas serta reliabilitasnya. (Fithri et al., 2024; Subhaktiyasa, 2024). Pada penelitian ini, metode pengukuran yang digunakan yaitu:

1. Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yakni validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk memiliki keterkaitan yang kuat, sedangkan validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih makna antar variabel penelitian. (Yang, 2023).

1) *Convergent Validity*

Validitas konvergen merupakan aspek penting untuk menilai kesesuaian instrumen penelitian dalam analisis menggunakan SmartPLS (Carlos Rodr'Ígue et al., 2024). Pada pendekatan indikator reflektif, evaluasi dilakukan melalui nilai factor loading yang menunjukkan kekuatan hubungan antara indikator dan konstruk yang diukur. Umumnya, nilai loading di atas 0,70 dianggap memadai dalam penelitian konfirmatori, sedangkan nilai di atas 0,60 masih dapat diterima pada penelitian eksploratori. Dalam penelitian ini digunakan kriteria loading factor > 0,70. Selain itu, validitas konvergen juga dinilai melalui Average Variance Extracted (AVE) yang seharusnya memiliki nilai lebih dari 0,50. Hubungan kausal antar konstruk beserta nilai loading masing-masing indikator ditunjukkan pada Gambar 2:



Gambar 2. Outer Model
Sumber: diolah SMART PLS4 (2025)

Gambar 2 menampilkan hasil validitas konvergen yang diperoleh dari analisis data menggunakan perangkat lunak PLS. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai loading factor setiap indikator pada konstruk. Sebuah konstruk dianggap memiliki validitas konvergen apabila loading factor-nya melebihi 0,70 serta nilai AVE lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Loading Faktor Akhir

Variabel (Simbol)	Indikator	Loading Factor	Note
Kinerja Pemerintah (X1)	X1.1	0.888	Valid
	X1.2	0.908	Valid
	X1.3	0.909	Valid
	X1.4	0.917	Valid
Transparansi Pemerintahan (X2)	X2.1	0.931	Valid
	X2.2	0.874	Valid
	X2.3	0.897	Valid
	X2.4	0.904	Valid
Kepercayaan Politik (Y)	Y1	0.928	Valid
	Y2	0.880	Valid
	Y3	0.906	Valid
	Y4	0.873	Valid

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis *loading factor* pada setiap variabel manifest menunjukkan bahwa seluruh indikator terhadap variabel laten memiliki nilai di atas 0,70,

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE
Kinerja Pemerintah	0.820
Transparansi Pemerintahan	0.813
Kepercayaan Politik	0.804

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 2, terlihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) yang melebihi batas minimum sebesar 0,5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga indikator-indikator yang digunakan mampu merepresentasikan konstruk laten secara akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel manifest dalam model penelitian ini memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Kondisi ini menegaskan bahwa hubungan antara indikator dan konstraknya bersifat konsisten, valid, serta dapat dijadikan dasar yang andal untuk analisis lanjutan dalam penelitian ini

2) *Discriminant Validity*

Uji validitas diskriminan dilakukan dengan menganalisis Cross Loading Factor serta membandingkan nilai Average Variance Extracted (AVE) dengan korelasi antar variabel laten. Apabila setiap indikator memiliki korelasi yang lebih tinggi terhadap konstruk asalnya dibandingkan dengan konstruk lainnya, maka validitas diskriminan dinyatakan terpenuhi. Adapun hasil pengujian Cross Loading ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Cross Loading Factor

Indikator	Kinerja Pemerintah (X1)	Transparansi Pemerintahan (X2)	Kepercayaan Politik (Y)
KP1	0.888	0.842	0.849
KP 2	0.908	0.865	0.855
KP 3	0.909	0.872	0.878
KP 4	0.917	0.889	0.891
TP1	0.819	0.819	0.873
TP2	0.886	0.886	0.898
TP3	0.842	0.842	0.854
TP4	0.868	0.868	0.872
KPO1	0.891	0.901	0.928
KPO2	0.830	0.817	0.880
KPO3	0.897	0.904	0.906
KPO4	0.819	0.823	0.873

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai Cross Loading Factor menunjukkan korelasi tertinggi antara setiap konstruk laten dan indikator yang sesuai dibandingkan dengan konstruk lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas yang memadai dalam mengukur variabel laten.

2. Uji Reliabilitas

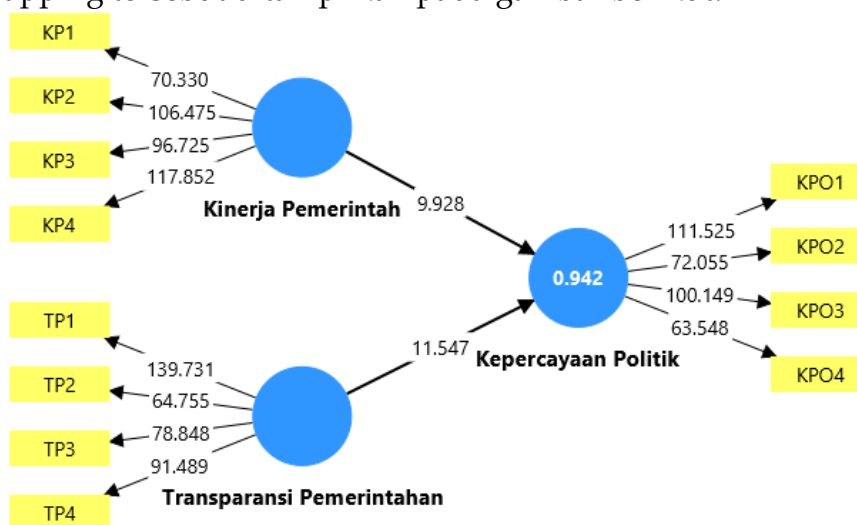
Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha (CA) merupakan dua cara yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas Partial Least Square (PLS):

Tabel 4. CA dan CR

Variabel	CA	CR	Kesimpulan
Kinerja Pemerintah	0.919	0.921	Reliabel
Transparansi Pemerintahan	0.927	0.927	Reliabel
Kepercayaan Politik	0.923	0.924	Reliabel

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa data penelitian reliabel karena setiap indikator konsisten dalam mengukur variabelnya. Hal ini dibuktikan oleh nilai Composite Reliability (CR) > 0,7 dan Cronbach's Alpha (CA) > 0,6. Selanjutnya, evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk menilai hubungan antar variabel laten melalui analisis koefisien jalur dan uji signifikansi menggunakan metode bootstrapping. Adapun hasil uji bootstrapping tersebut ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Bootstrapping

Sumber : diolah Smart PLS 4(2025)

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai *Path Coefficient* diperoleh melalui perhitungan *t-statistic*, di mana hasil dianggap signifikan apabila melebihi nilai 1,96 pada

uji *two-tailed*. Berdasarkan hasil tersebut, hubungan antara variabel X1 (kinerja pemerintah) terhadap Y (kepercayaan politik) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 9,928 yang menandakan adanya pengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, hubungan X2 (transparansi pemerintahan) terhadap Y menunjukkan nilai yang lebih tinggi yaitu 11,547, menegaskan bahwa transparansi pemerintahan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepercayaan politik. Kedua variabel melampaui batas signifikansi, sehingga mendukung hipotesis penelitian. Selain itu, seluruh indikator menunjukkan nilai *t-statistic* yang tinggi, memperkuat validitas serta reliabilitas konvergen dari konstruk yang diuji. Temuan ini menegaskan bahwa faktor kinerja pemerintah dan transparansi pemerintahan berperan penting dalam memperkuat kepercayaan politik. Analisis model struktural (*inner model*) menggunakan SMARTPLS 4 dilakukan dengan menilai keterkaitan antar konstruk laten melalui nilai R-Square, serta menguji signifikansi koefisien jalur pada variabel dependen melalui uji t.

Tabel 5. Hasil R Square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Keberlanjutan Bisnis	0.942	0.942

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Nilai R-square diperoleh dari perhitungan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R-square sebesar 94,2% untuk variabel Kepercayaan Politik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dan transparansi pemerintahan mampu menjelaskan 94,2% variasi pada variabel tersebut. Persentase yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat kemampuan prediktif yang kuat, sehingga kedua variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan politik, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Selanjutnya, evaluasi *Goodness of Fit (GoF)* menunjukkan bahwa model dianggap layak apabila nilai SRMR berada di bawah 0,10, dan dikategorikan *perfect fit* jika kurang dari 0,08. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu merepresentasikan hubungan antarvariabel secara optimal serta menunjukkan kesesuaian data yang tinggi tanpa banyak kesalahan residu yang signifikan (Imtihansyah et al., 2024; Legate et al., 2023).

Tabel 6. Q-Square

Variabel	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.042	0.042

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji *Goodness of Fit (GoF)*, nilai SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*) sebesar 0,042 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik. Nilai tersebut memenuhi kriteria ideal, karena $SRMR \leq 0,08$ menandakan model yang baik dan $SRMR \leq 0,05$ tergolong sangat baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa selisih antara matriks kovarian hasil observasi dan matriks kovarian yang diprediksi oleh model sangat kecil. Dengan demikian, model dinilai layak serta dapat diandalkan dalam menggambarkan hubungan antara variabel kinerja pemerintah, transparansi pemerintahan, dan kepercayaan politik yang berarti data aktual dan data hasil prediksi model menunjukkan kesesuaian yang tinggi..

3. Pengujian Hipotesis

Proses pengujian hipotesis dilakukan setelah data dinyatakan memenuhi kriteria pengukuran dengan menerapkan metode bootstrapping pada aplikasi Smart PLS4. Metode ini memiliki keunggulan karena tidak mengharuskan adanya asumsi distribusi normal atau ukuran sampel yang besar (Xu et al., 2023). Analisis dilakukan dengan meninjau nilai koefisien jalur, t-value, dan p-value guna mengevaluasi hubungan antarvariabel, serta menilai koefisien parameter yang menggambarkan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel dalam model penelitian.

Tabel 6. Uji Signifikan Jalur (Path)

Hubungan	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kinerja Pemerintah (X1) -> Kepercayaan Politik (Y)	0.456	9.928	0.000
Transparansi Pemerintahan (X2) -> Kepercayaan Politik (Y)	0.525	11.547	0.000

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Peneliti menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, yang berarti dalam pengujian hipotesis dua arah, nilai *Path Coefficient* dianggap signifikan apabila nilai *t-statistic* melebihi 1,96. Berdasarkan hasil perhitungan *Path Coefficient* dan *t-statistic* yang disajikan pada tabel, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh langsung antara variabel-variabel yang diuji yaitu sebagai berikut :

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat (H1)

Dalam pengujian hipotesis yang diajukan, dilakukan analisis menggunakan nilai t-value untuk menilai pengaruh kinerja pemerintah terhadap kepercayaan politik. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai t-value sebesar 9,928, yang melampaui batas kritis 1,96, serta p-value 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima, artinya terdapat

pengaruh signifikan antara kinerja pemerintah terhadap kepercayaan politik. Selain itu, nilai estimasi koefisien sebesar 0,456 menandakan bahwa peningkatan kinerja pemerintah dapat secara positif meningkatkan kepercayaan politik masyarakat sebesar 0,456, menunjukkan kontribusi yang nyata dari kinerja pemerintah kepercayaan politik masyarakat.

Pengaruh Transparansi Pemerintahan terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat (H2)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa transparansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan politik, dengan nilai *t*-hitung sebesar 11,547 yang melebihi batas kritis 1,96 dan nilai *p* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menegaskan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga transparansi pemerintahan terbukti memberikan dampak positif terhadap kepercayaan politik. Selain itu, nilai estimasi sampel asli sebesar 0,525 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara inovasi produk dan keberlanjutan bisnis. Dengan kata lain, semakin tinggi transparansi yang diterapkan oleh pemerintah, maka semakin besar pula peluang kepercayaan politik masyarakat.

Pembahasan

1. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan bahwa kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan politik masyarakat di Kecamatan Sindangbarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t*-statistic sebesar 9,928 (di atas 1,96) dan nilai *p*-value 0,000. Koefisien jalur sebesar 0,456 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kinerja pemerintah akan diikuti oleh peningkatan kepercayaan politik sebesar 45,6%. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, dan responsivitas pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam membentuk kepercayaan mereka. Ketika pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan, masyarakat cenderung memberikan penilaian positif yang memperkuat legitimasi politik institusi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori sosiologi politik yang menyatakan bahwa pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan publik menjadi dasar pembentukan sikap percaya terhadap pemerintah. Secara empiris, temuan ini mendukung penelitian dari Sirajuddin dan Atrianingsi (2020) serta Afdila dan Adnan (2023) yang menekankan bahwa efektivitas fungsi pemerintahan berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan. Selain itu, hasil ini juga memperkuat temuan Subardi (2018), Chaharani et al. (2020), dan Rauf (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

2. Pengaruh Transparansi Pemerintahan terhadap Kepercayaan Politik Masyarakat

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa transparansi pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan politik masyarakat, bahkan dengan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan variabel kinerja. Nilai *t-statistic* yang diperoleh sangat tinggi, yaitu 11,547, dengan nilai *p-value* 0,000 dan koefisien jalur sebesar 0,525. Transparansi melalui keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran publik terbukti mampu mengurangi kecurigaan serta ketidakpastian di tengah masyarakat. Di Kecamatan Sindangbarang, akses informasi yang memadai memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan, yang pada akhirnya meningkatkan persepsi mereka terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Temuan ini mendukung argumen Hu *et al.* (2020) dan Riyadh *et al.* (2023) bahwa keterbukaan dalam menyampaikan informasi kebijakan dan anggaran dapat memperkuat legitimasi politik. Sebaliknya, temuan ini juga mengonfirmasi kekhawatiran dalam penelitian Kim, Lee, dan Kim (2020) serta Tuati, Siahaan, dan Samadara (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya transparansi sering kali memicu persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan politik. Hal ini menegaskan bahwa transparansi adalah instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dan transparansi pemerintahan merupakan faktor krusial dalam membangun kepercayaan politik masyarakat. Pertama, kinerja pemerintah daerah terbukti memberikan dampak positif terhadap kepercayaan politik. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, dan responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga menjadi dasar utama pembentukan sikap percaya. Ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah, legitimasi politik institusi tersebut akan semakin kuat.

Kedua, transparansi pemerintahan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan politik, bahkan ditemukan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan faktor kinerja. Keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan anggaran publik berperan penting dalam mengurangi kecurigaan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Poin paling menonjol dari penelitian ini adalah hasil uji R-Square yang mencapai 94,2%. Nilai ini mengindikasikan bahwa variasi tingkat kepercayaan politik masyarakat di wilayah tersebut hampir seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel kinerja dan transparansi pemerintah. Dengan tingkat kemampuan prediktif yang sangat kuat, model ini menegaskan bahwa sinergi antara efektivitas kerja dan prinsip keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menjaga stabilitas demokrasi di tingkat lokal. Penguatan kedua aspek ini akan secara langsung meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik.

REFERENSI

- Abdillah, M. N. L., & Fadilah, S. (2024). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Sipil Negara. *Bandung Conference Series Accountancy*, 4(1), 1-7. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.9891>
- Afdila, A., & Adnan, M. F. (2023). Digitalisasi Administrasi Publik Sebagai Salah Satu Perwujudan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 27-32. <https://doi.org/10.69989/4gt1t617>
- Afifuddin, M. A., Sukirman, S., & Sunarno, S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Peran Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kecamatan Jepara Di Kabupaten Jepara). *Jurnal Studi Manajemen Bisnis*, 1(1), 33-50. <https://doi.org/10.24176/jsmb.v1i1.8110>
- Agustina, I. R. (2023). Implementasi Open Government Indonesia Melalui Saluran Youtube Resmi Sekretariat Presiden. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(1), 134-151. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i1.5674>
- Alvioni, A. T., Miradhia, D., & Bonti, B. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. *Jane - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 152. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41278>
- Amir, B., Mediaty, M., Kusumawati, A., & Darmawati, D. (2024). The Effect of Financial Accounting System and Public Service Motivation on the Local Government Performance. *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 240. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i1.1958>
- Annisa, S. (2024). Efektivitas Fungsi Pemerintahan Dalam Menjaga Keseimbangan Demokrasi Di Indonesia. *Al-Ijtima'i International Journal of Government and Social Science*, 9(2), 17-22. <https://doi.org/10.22373/jai.v9i2.4385>
- Ardielli, E., & Vavrek, R. (2019). Evaluation of Egovernment and Good Governance Development in EU Member Countries. *Acc Journal*, 25(2), 7-20. <https://doi.org/10.15240/tul/004/2019-2-001>
- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *Jane - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 594. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111>
- Bader, M., & Moshagen, M. (2025). Assessing the fitting propensity of factor models. *Psychological Methods*, 30(2), 254-270. <https://doi.org/10.1037/met0000529>
- Carlos Rodr Igue, J., Van Der Merwe, J., Aditiya Prabowo, D., Muarif Wahid, S., & Putra Cesna, G. (2024). Improving Natural Resource Management through AI: Quantitative Analysis using SmartPLS. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, 2(2), 135-142. <https://doi.org/10.33050/italic.v2i2.548>
- Chaharani, N. A., Adi, T. P., & Hasmi, D. L. (2020). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online (Apapo) Dalam Perspektif E-Government. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 83.



- <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.83-88>
- Ciavolino, E., Rollo, S., Cheah, J.-H., Sternativo, G. A., Venuleo, C., Marinaci, T., & Ferrante, L. (2021). A confirmatory composite analysis for the Italian validation of the interactions anxiousness scale: a higher-order version. *Behaviormetrika*, 49(1), 23–46. <https://doi.org/10.1007/s41237-021-00151-x>
- Clarke, D., Appleford, G., Coccozza, A., Thabet, A., & Bloom, G. (2023). The Governance Behaviours: A Proposed Approach for the Alignment of the Public and Private Sectors for Better Health Outcomes. *BMJ Global Health*, 8(Suppl 5), e012528. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012528>
- Crepaz, M., & Arian, G. (2023). The Effects of Transparency Regulation on Political Trust and Perceived Corruption: Evidence From a Survey Experiment. *Regulation & Governance*, 18(3), 896–913. <https://doi.org/10.1111/rego.12555>
- Dawkins, R. (2020). Private Contracting and Citizen Attitudes Toward Local Government. *Urban Affairs Review*, 57(5), 1286–1311. <https://doi.org/10.1177/1078087420918660>
- Desa, P., Harista, S., & Pemerintah, E. (2023). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kota Bekasi. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (Jisp)*, 4(2). <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i2.15986>
- Dewi, D. S. K., Yulianti, D. B., & Djuwitaningsih, E. W. (2024). How Is E-Government Readiness and Its Impact on Muhammadiyah Citizens? (An Analysis of Ponorogo Internet Program Enters RT). *Journal of Government and Civil Society*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v8i1.9432>
- Dewi, Y. S. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(1), 53–63. <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247>
- Ecevit, Y. A., & Karakoç, E. (2016). The Perils of Semi-Presidentialism: Confidence in Political Institutions in Contemporary Democracies. *International Political Science Review*, 38(1), 4–20. <https://doi.org/10.1177/0192512115599243>
- Fahira, A. (2023). Peran Transparansi Dan Derajat Otonomi Fiskal Dalam Menentukan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i7.3942>
- Fardiah, D. (2025). Transparansi Informasi Publik Digital PR Dinas Sumber Daya Air Prov. Jabar Di Instagram. *Bandung Conference Series Public Relations*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcspr.v5i2.19297>
- Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat, H. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 74–78. <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.74-78>
- Fithri, P., Syafrizal, S., Hasan, A., & Games, D. (2024). Validation Studies a Questionnaire Developed to Measure Incubator Business Technology Performance using PLS-SEM Approach. *Andalasian International Journal of Applied Science, Engineering and Technology*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.25077/aijaset.v4i1.132>
- Gani, R. A., & Suparman, A. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang). *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654>
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G. A., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. <https://doi.org/10.1111/puar.12047>
- Hamzah, M., Surahman, F., Abdurahman, A., Saputri, E., & Basyarahil, A. (2024). Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah. *Assyarikah Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 199. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1891>
- Hariyanto, H. (2022). *Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zyr5h>
- Henovanto, K., Manşûr, M., Ghina, S., & Putri, Z. K. (2019). Analisis Pencapaian Pejabat Pengelola



- Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Dki Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. *Papatung Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 83–96. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.18>
- Hidayat, R. (2025). Digital Governance and Transparency: How Open Data Initiatives Enhance Government Accountability. *Journal of Governance and Regulation*, 14(3), 194. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i3art18>
- Hu, Q., Zhang, L., Zhang, W., & Zhang, S. (2020). Empirical Study on the Evaluation Model of Public Satisfaction With Local Government Budget Transparency: A Case From China. *Sage Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020924064>
- Imtihansyah, R., Prayoga, H. D., Tomoliyus, T., Sukamti, E. R., Amalia, B., Prabowo, T. A., Fitrianto, A. T., & Fauzi, F. (2024). The Impact of Parental Support on Performance Achievement through Achievement Motivation in Elite Athletes in South Kalimantan, Indonesia: A Cross-Sectional Study with Structural Equation Modeling Analysis. *Retos*, 57, 346–354. <https://doi.org/10.47197/retos.v57.105996>
- Ivanyna, M., & Salerno, A. (2021). *Governance*. 353–390. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192846938.003.0010>
- Jalaludin, I., & Gefira Minhatul Maula, N. (2025). The Effectiveness of the Vice Regent's Authority in Conducting Sudden Inspection as an Instrument for Strengthening Local Governance in Kuningan Regency. *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 135–162. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i2.267>
- Kim, S., Lee, Y., & Kim, T. (2020). The Relationship Between Fiscal Decentralization and Trust in Government: Evidence From the South Korean Case. *International Review of Administrative Sciences*, 88(2), 373–389. <https://doi.org/10.1177/0020852320933325>
- Kristian, I., Rahma, A. F., Nugraha, B., & Putri, C. A. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v18i3.70>
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in the Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.231-244>
- Legate, A. E., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2023). PLS-SEM: A method demonstration in the R statistical environment. *Human Resource Development Quarterly*, 35(4), 501–529. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21517>
- Maschuroh, A., & Priono, H. (2021). Evaluasi Kinerja Reformasi Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan Pendekatan Kualitatif. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 460–468. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1887>
- Maulana Rizky, Alhidayatullah, S. S. (2025). *MSME Sustainability Strategy Through the Application of Digital Marketing and Product Innovation in the VUCA Era : A Study of SMEs in Sukabumi City*. 3(4), 366–383.
- Mohd Dzin, N. H., & Lay, Y. F. (2021). Validity and Reliability of Adapted Self-Efficacy Scales in Malaysian Context Using PLS-SEM Approach. *Education Sciences*, 11(11), 676. <https://doi.org/10.3390/educsci11110676>
- Nasirin, C., Winaja, I. W., & Pratama, A. F. (2023). Collaborative Governance of Public Health: A Cultural and Ethical Perspective on Predicting Citizens' Trust in Public Health Services During Medical Emergencies. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(2), 147–165. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1604>
- Pareek, U., & Sole, N. A. (2022). Quality of Public Services in the Era of Guaranteed Public Service Delivery. *Indian Journal of Public Administration*, 68(2), 160–173. <https://doi.org/10.1177/00195561211072575>
- Pratiwi, C. S. (2020). Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018.



- Jurnal Khazanah Intelektual*, 3(3), 557–569. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v3i3.40>
- Putri, D. R., Azlina, N., & A, A. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah Dimoderasi Komitmen Organisasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(2), 597–606. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.5233>
- Rahman, F. A., Rifdan, R., Nasruddin, N., Jusriadi, A., & Agus, M. (2024). Facing Challenges in Achieving Clean Government: A Public Administration Perspective. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(2), 565. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67931>
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi Dan Pemilu Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361–366. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>
- Rauf, S. (2021). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x697u>
- Riyadh, D. H., Supriati, B. C., & Lopez, T. C. (2023). Transparency and Policy Implementation in the Public Sector in Singapore. *Journal of Public Policy & Governance*, 7(3), 1–12. <https://doi.org/10.53819/81018102t5223>
- Schmidhuber, L., Ingrams, A., & Hilgers, D. (2020). Government Openness and Public Trust: The Mediating Role of Democratic Capacity. *Public Administration Review*, 81(1), 91–109. <https://doi.org/10.1111/puar.13298>
- Setiadi, Sandi; Alhidayatullah; Maulana, R. (2025). *Towards the Sustainability of Food MSMEs through Strengthened Collaboration and Competitiveness*. 3(4), 331–345.
- Setiadi, S., Maulana, R., & Hidayat, S. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160–180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD Dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 179–184. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8108>
- Sirajuddin, S. M., & Atrianingsi, A. (2020). Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government: Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 80. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.80-88.2020>
- Subardi, L. (2018). Pengaruh Tanggungjawab Aparat Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Pada Kecamatan Tugumulyo Musirawas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v9i1.434>
- Subhaktiyasa, P. (2024). PLS-SEM for Multivariate Analysis: A Practical Guide to Educational Research using SmartPLS. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 4(3), 353–365. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline2861>
- Sumitro, & Yorman. (2024). Legitimasi Pemerintah Dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis Atas Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Politik. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 3(5), 243–251. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>
- Syrstad, T. G., Haugsgjerd, A., & Kumlin, S. (2025). Iceberg of Discontent? Emotional Responses to Welfare State Development and Political Trust. *Journal of European Social Policy*. <https://doi.org/10.1177/09589287251337883>
- Teguh, N., & Mohammad, N. (2025). Membangun Akuntabilitas Vertikal Dan Horizontal Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah. *Journal of Economics Business Management Accounting and Social Sciences*, 3(6), 413–419. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i6.240>
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2022). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>
- Tuati, N. F., Siahaan, M., & Samadara, S. (2021). *The Impact of Accountability and Transparency on the*



-
- Management of the Regional Expenditure Budgets of the Kupang District Government.*
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.100>
- Uslaner, E. M. (2015). *Trust, Political*. 658–663. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-097086-8.93151-9>
- Wahyono, P. C., & Muhammad, A. S. (2025). The Influence of Good Governance Principles on Financial Management of the Regional Secretariat in Kulon Progo Regency. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 4863–4872. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2023>
- Widaningrum, A. (2017). Public Trust and Regulatory Compliance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jsp.28679>
- Widyaningrum, N., & Utama, D. B. (2022). Transparansi Publik Dalam Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Desa. *Jurnal Pelita Kota*, 3(1), 120–129. <https://doi.org/10.51742/pelita.v3i1.461>
- Wu, W., Ma, L., & Yu, W. (2017). Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China. *Administration & Society*, 49(6), 882–906. <https://doi.org/10.1177/0095399716685799>
- Xu, T., Li, X., Zhu, Y., Li, W., Sheng, F., Chen, Q., Xu, T., Wang, Y., & Ge, L. (2023). Scalable and interfacial gap-free mixed matrix membranes for efficient anion separation. *AIChE Journal*, 70(2). <https://doi.org/10.1002/aic.18242>
- Yang, D. (2023). *Design for environmentally sustainable furniture systems – the knowledge and know-how of furniture life cycle design and furniture sustainable product-service system design*. Taylor & Francis.
- Zhang, X., & Wu, H. (2024). Investigating Structural Model Fit Evaluation. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 31(5), 863–881. <https://doi.org/10.1080/10705511.2024.2350023>